



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI BALI
PADA RESES DI MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022 - 2023**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum	KETUA TIM / WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI / F- P. GOLKAR
2.	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI / F- P. NASDEM
3.	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI / F- PAN
4.	ICHSAN SOELISTIO	ANGGOTA TIM / F-PDI PERJUANGAN
5.	Dr. I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-PDI PERJUANGAN
6.	DEDE INDRA PERMANA, S.H.	ANGGOTA TIM / F-PDI PERJUANGAN
7.	H. GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M.	ANGGOTA TIM / F-PDI PERJUANGAN
8.	Dr. Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA. S.Sos., M.Si.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
9.	Dr. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI S.H, M.Kn.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
10.	Hj. SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. GERINDRA
11.	BIMANTORO WIYONO. S.H.	ANGGOTA TIM / F- P. GERINDRA
12.	H. TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M.	ANGGOTA TIM / F-P. NASDEM

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 23-27 Oktober 2023 di Provinsi Bali. Adapun pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Bali
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
4. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
7. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar
8. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Bali

a. Bidang Anggaran

1. Pagu Awal dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Terkait dengan anggaran pada tahun 2023 ini Polda Bali menerima Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.498.239.170.000,- sampai dengan bulan September 2023, realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebesar Rp. 1.124.085.072.787,- atau 75.03% dari keseluruhan anggaran.

2. Program Prioritas Tahun 2023

Telah dikeluarkan oleh Kapolda Bali 10 komander wish yang meliputi:

- a) Mengutamakan Tindakan preventif/pencegahan
- b) Mewujudkan Harkamtibmas
- c) Tingkatkan kualitas pelayanan
- d) Jaga sinergitas dan solidaritas TNI dan instansi terkait
- e) Penegakan hukum yang tegas
- f) Bangun kultur yang baik
- g) Medsos sebagai mitra strategis
- h) Tingkatkan Pam dan Was Internal
- i) Amankan rangkaian Pemilu 2024
- j) Wujudkan Polda Bali yang Presisi dan HEBAT (Humanis, Edukatif, Bermoral Anti KKN dan Teladan)

3. Target PNBPN Tahun 2023

Sampai dengan bulan September 2023 Polda Bali dan jajaran telah berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 232.620.455.653,-, yang berasal dari berbagai jenis pelayanan dan penerimaan lainnya yang dikelola oleh Polda Bali dan jajaran.

4. Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2023

No	Satuan Kerja	Pembangunan
1	Polres Empat Lawang	<ul style="list-style-type: none">• Rumah Dinas Tipe 38 sebanyak 50 unit senilai Rp9.031.895.000• Poliklinik Polres Empat Lawang Tipe 120 sebanyak 1 unit senilai Rp752.800.000
2	Polres Ogan Ilir	Rumah Dinas Tipe 38 sebanyak 10 unit senilai Rp2.211.231.000

No	Satuan Kerja	Pembangunan
3	Polres Pali	Rumah Dinas Tipe 38 sebanyak 60 unit senilai Rp10.059.460.000
4	Batalyon D Brimob Pali	Mako Batalyon D Brimob Pali berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Pali senilai Rp2.500.000.000
5	Komplek PAAKRI	Kolam renang Komplek PAAKRI berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Pali senilai Rp3.330.645.000

5. Usulan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024

No	Satuan Kerja	Pembangunan
1	Batalyon C Brimob Belitang	Perumahan personel sebanyak 50 unit senilai Rp17.363.200.800
2	Polres Ogan Ilir	SPKT Polres Ogan Ilir senilai Rp1.974.465.000

6. Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

- a) Kebutuhan anggaran belanja barang yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Polda Bali sebesar Rp. 90.162.541.000,-
- b) Kebutuhan anggaran belanja modal yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Polda Bali sebesar Rp. 199.409.126.000,-. Jumlah tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan beberapa rencana pembangunan gedung kantor maupun asrama Polri dan pengadaan sarana prasarana pendukung tugas kepolisian lainnya.

7. Pagu Anggaran Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
1	Belanja Pegawai	943.992.808.000
2	Belanja Barang	496.868.264.000
3	Belanja Modal	1.483.096.000
Total		1.442.344.168.000

8. Program Prioritas Tahun 2024

- a) Mewujudkan rasa mana di tengah masyarakat dengan memperkuat stabilitas harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Bali yang inovatif
- c) Meningkatkan kepercayaan public melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel
- d) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Bali
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana dan almatsus Polda Bali yang modern
- f) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis T.I.

9. Target PNBPN Tahun 2024

Pada tahun 2024, Polda Bali memiliki target PNBPN sebesar Rp. 67.638.776.000,-

b. Bidang Pengawasan

1. Tindak Pidana Umum

- a) Total Laporan : 2.392 Kasus
- b) Total Penyelesaian : 1.615 Kasus atau sebesar 67,51%

- c) Jenis tindak pidana yang paling sering terjadi: Curanmor, Curat, Curas, Pembunuhan dan Anirat.
2. Tindak Pidana Khusus
- a) Total Laporan : 195 Kasus
 - b) Total Penyelesaian : 89 Kasus atau sebesar 45,64%
 - c) Jenis tindak pidana yang paling sering terjadi: Pelanggaran UU ITE, Penipuan Online, Fidusia, Tipikor dan Judi Online.
3. Narkoba
- a) Total Laporan : 664 Kasus
 - b) Total Penyelesaian : 579 Kasus atau sebesar 87,19%
 - c) Jenis barang bukti yang paling banyak diamankan diantaranya: Ganja, Shabu, Kokain, Mushroom dan Ekstasi.
4. Berdasarkan arahan dari Kabareskrim Polri, untuk meningkatkan pengungkapan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah bali, Polda Bali membentuk satgasda narkoba polda bali yang dipimpin oleh wakaolda Bali. Sejak tanggal 21 September sampai dengan 10 Oktober 2023, Ditresnarkoba Polda Bali dan satresnarkoba jajaran berhasil mengungkap sebanyak 30 kasus narkoba dengan total 35 orang tersangka yang terdiri dari 29 pria dan 6 wanita. Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya yaitu:
- a) Ganja : 145,69 gram
 - b) Shabu : 127,31 gram
 - c) Ketamin : 500 gram
 - d) Tembakau Gorilla : 23,09 gram
 - e) Ekstasi : 888 butir
5. Upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri
- a) Harkamtibmas
 - Melaksanakan cyber patrol, counter opini dan take down terhadap konten media sosial yang mengandung muatan melanggar hukum maupun isu sara
 - Melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD), binlih, sambaing, himbauan kamtibmas, jumat curhat, minggu kasih
 - Melaksanakan penggalangan terhadap tokoh-tokoh ormas, tokoh adat dan tokoh agama
 - Meningkatkan peran bhabinkamtibmas, polisi banjar dan sipandu beradat (sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat) dalam menjaga situasi kamtibmas wilayah bali, mulai dari tingkat banjar.
 - Melaksanakan kegiatan patroli terpadu melalui sinergitas TNI-Polri dan instansi terkait seperti patroli simakrama, patroli jaga dewata, patroli srikandi dan blue light patrol.
 - b) Pengamanan Event
 - Mengklasifikasikan jenis kegiatan yang dilaksanakan menjadi event nasional dan internasional sebagai dasar penyusunan rencana pengamanan.

- Menetapkan sistem, pola pengamanan cara bertindak dan pembagian wilayah pengamanan, serta berkoordinasi dengan pihak panitia, paspampres dan pamwil TNI.
- Menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) atau operasi kepolisian dalam rangka mengamankan rangkaian event nasional atau internasional.
- Menggelar personel pengamanan pada lokasi kegiatan mulai dari bandaram hotel/penginapan, lokasi kegiatan, lokasi kunjungan, lokasi gala dinner/lunch dan sepanjang jalur yang dilalui rangkaian kendaraan peserta.
- Mengoptimalkan pengawasan kegiatan pengamanan melalui command center polda bali dan command center ITDC yang memiliki berbagai fitur canggih.

c) Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan public Polda Bali yang inovatif seperti: Si Jalak Bali, Wayan Polairud, SIM Booster, Tedun Banjar, SKCK on The Spot, Samsat Kerti Polda Bali

II. Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Hingga September 2023 Kejaksaan Tinggi Bali telah berhasil melaksanakan realisasi mencapai 78,21%.

Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
KT Bali	58.806.380.000	46.396.388.969	78,90%
KN Denpasar	16.601.394.000	12.161.550.221	73,26%
KN Buleleng	10.598.171.000	8.303.290.120	78,35%
KN Bangli	8.641.585.000	7.064.282.404	81,75%
KN Karangasem	6.766.955.000	5.511.217.625	81,44%
KN Gianyar	10.704.721.000	8.839.750.195	82,58%
KN Jembrana	7.892.958.000	6.550.914.163	83,00%
KN Tabanan	9.317.511.000	6.909.279.955	74,15%
KN Klungkung	8.911.514.000	7.188.251.916	80,66%
CKN Nusa Penida	3.804.362.000	2.780.519.913	73,09%
KN Badung	12.413.230.000	9.096.798.210	73,28%
Total	154.458.781.000	120.802.243.691	78,21%

2. Program Prioritas Tahun 2023

Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan rincian output antara lain:

- a) Peningkatan akses terhadap keadilan
- b) Pemberdayaan hukum bagi masyarakat

- c) Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri
3. Target PNBPN Tahun 2023
Kejaksaan Tinggi Bali telah berhasil memperoleh PNBPN sebesar Rp. 5.917.904.318,- dari target sebesar Rp. 7.405.028.000,- atau telah mencapai 79,92%. Realisasi PNBPN masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2023.
4. Kebutuhan Anggaran Tahun 2023
- a) Anggaran Sarana dan Prasarana:
- Pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Kejati Bali.
 - Renovasi gedung kantor Kejari Klungkung senilai 22,9 miliar rupiah (termasuk mebel).
 - Rehab rumah dinas Kejati, Kejari dan Cabjari.
 - Komputer, printer, scanner, dan aplikasi IT pada Gedung Pengelolaan Barang Bukti, Sitaan dan Rampasan, Rumah Tahanan dan Rumah Sakit Adhyaksa Kejati Bali.
 - Kendaraan dinas roda dua, kendaraan dinas roda empat, ambulans, kendaraan barang bukti, sitaan dan rampasan, kendaraan tahanan.
- b) Anggaran Belanja Pegawai:
- ASN: penjaga tahanan, pengemudi kendaraan tahanan, dokter, bidan, perawat, petugas barang bukti, penilai pemerintah (petugas lelang barang rampasan), pengelola keuangan, pranata komputer.
 - Penambahan PPNPN: satpam, petugas kebersihan, pramubakti, pengemudi.
- c) Anggaran Operasional Kantor:
Listrik, air, telepon, internet, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin, seragam kerja, dan lain-lain untuk operasional perkantoran Gedung Pengelolaan Barang Bukti, Sitaan dan Rampasan, Rumah Tahanan Kejati Bali, dan Rumah Adhyaksa Kejati Bali (BLU).
- d) Anggaran Penunjang Kegiatan / Tugas dan Fungsi:
- Pelaksanaan pemeliharaan, pemusnahan dan penyelesaian barang bukti, sitaan dan rampasan.
 - Konsumsi, logistik tahanan, BBM kendaraan tahanan, dan lain-lain pada Rumah Tahanan Kejati Bali.
 - Konsumsi, logistik Rumah Sakit Adhyaksa dan lain-lain pada Rumah Sakit Adhyaksa Kejati Bali (BLU).
5. Pagu Anggaran Tahun 2024
Berkenaan dengan Pagu Anggaran Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Bali memperoleh anggaran sebesar Rp. 164.611.249.000,-
6. Rencana Strategis dan Program Skala Prioritas Tahun 2024
Dalam hal penetapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, dukungan Kejaksaan Republik Indonesia meliputi:
- a) Renja K/L
- Pelatihan penanganan penyelesaian sengketa pemilu / [ilkada

- Biaya pengamanan sidang perkara penting / pemilu
- Bimtek peningkatan kapasitas jaksa dalam tindak pidana pemilu dan sosialisasi KUHP
- Bimtek peningkatan kapasitas jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan
- Pemantauan pemilu
- Sinergitas
- Penguatan sinergitas antar penyelenggara sentra gakkumdu agar terjadi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.

7. Target PNBPN Tahun 2024

Berkenaan dengan capaian PNBPN Kejaksaan Tinggi Bali tahun 2023 yang sudah memenuhi target, maka tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Bali menargetkan PNBPN sebesar Rp4.211.339.000 ,-

b. Bidang Pengawasan

1. Bidang Pidana Umum:

a) Jumlah penanganan perkara dari seluruh satker Bali Periode Januari – Oktober 2023:

- Prapenuntutan : 2277 perkara, diselesaikan 1799 perkara
- Penuntutan : 1799 perkara, diselesaikan 1535 perkara
- Eksekusi Terpidana : 1535 perkara, diselesaikan 1468 perkara

b) Jumlah Perkara Restorative Justice (RJ) yang diusulkan dan terselesaikan periode Januari – Oktober 2023 se-wilayah Bali sebanyak 28 perkara dan Rumah Restorative Justice (RJ) periode Januari-Oktober 2023 se-wilayah Bali sebanyak 92 Rumah RJ

2. Bidang Pidana Khusus:

a) Perkara Tindak Pidana Korupsi

- Penyelidikan : 22 perkara, diselesaikan 15 perkara
- Penyidikan : 28 perkara, diselesaikan 14 perkara
- Prapenuntutan : 28 perkara, diselesaikan 19 perkara
- Penuntutan : 34 perkara, diselesaikan 16 perkara
- Eksekusi Terpidana : 22 perkara, diselesaikan 22 perkara

b) Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya

Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan:

- Prapenuntutan : 6 perkara, diselesaikan 5 perkara
- Penuntutan : 4 perkara, diselesaikan 3 perkara
- Eksekusi Terpidana : 3 perkara, diselesaikan 3 perkara

c) Jumlah penyelamatan dan pengembalian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus dari seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bali Periode Januari-Oktober 2023 sebanyak:

- Barang Rampasan : Rp. 0
- Uang Sitaan : Rp. 457.358.000
- Denda : Rp. 5.373.402.800
- Uang Pengganti : Rp. 18.991.394.547,36

d) Jumlah kerugian negara yang berhasil dikembalikan dari seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bali Periode Januari-Oktober 2023 sebanyak:

- Barang Rampasan : Rp. 0

- Uang Sitaan : Rp. 457.358.000
- Denda : Rp. 0
- Uang Pengganti : Rp. 2.248.791.250

3. Kendala dan Hambatan yang dihadapi

- a) Perkara Tipikor: Untuk penanganan perkara yang belum selesai secara umum karena masih proses baik penyelidikan maupun penyidikan kendala yang dihadapi menunggu hasil audit terhadap perhitungan kerugian negara.
- b) Tindak Pidana Umum:
- c) Kapasitas rumah tahanan tidak sebanding dengan tingginya tindak pidana yang terjadi di Bali
- d) Biaya pengobatan tahanan yang sakit tidak teralokasi dalam DIPA
- e) Dalam perkara pencurian, sering kali saksi tidak bisa hadir dikarenakan sudah Kembali ke Negara asalnya sedangkan proses hukum harus tetap berjalan
- f) Terdapat surat edaran kepala BNN RI yang menyatakan tidak menerima asesmen apabila urine tersangka negative padahal sering ditemukan pengguna yang belum sempat mengkonsumsi narkoba dan terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian
- g) Sidang PK dilaksanakan di tempat terpidana menjalankan pidana seperti PN Bangli dan PN Cilacap yang mana jauh dari satuan kerja JPU
- h) Untuk perkara narkoba terdakwa perempuan tidak bisa dilakukan penahanan di rutan Gianyar karena over kapasitas.

4. Upaya Membangun Sinergitas Koordinasi dan Kerja Sama

- a) Pelaksanaan rapat koordinasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan Tinggi Bali dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b) Pelaksanaan audiensi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan terkait pelaksanaan hasil analisis dan/atas hasil pemeriksaan dari PPATK
- c) Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi terkait penanganan perkara dan tahanan
- d) Mengikuti rapat koordinasi dengan penyidik kepolisian dan BPN terkait penanganan perkara mafia tanah
- e) Mengikuti rapat koordinasi dengan penyidik BPOM dan kepolisian terkait penanganan perkara obat dan makanan
- f) Mengikuti rapat koordinasi dengan penyidik BNNP dan kepolisian terkait tim assessment terpadu
- g) Mengikuti kegiatan workshop bersama BNN Provinsi Bali terkait penguatan kapasitas SDM dalam bidang pemberantasan dan intelijen serta mendukung pengungkapan kasus tindak pidana narkoba
- h) Menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan sinergitas penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja
- i) Memberikan sosialisasi kesiapan Kejati Bali beserta jajaran dibawahnya dalam menyambut Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kab. Bangli

III. Penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran Kanwil Kemenkumham Bali tahun 2023 sebesar Rp. 294.448.794.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 201.095.566.102,- atau 68,30%

2. Program Prioritas dan Rencana Strategis Tahun 2023

Pembinaan Hukum Nasional yaitu peningkatan kerjasama organisasi bantuan hukum (OBH) dan paralegal di kab/kota dalam peyaluran bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kurang mampu

3. Realisasi PNBPN Tahun 2023

Realisasi PNBPN Tahun 2023 sejumlah Rp 1.335.567.721.699,-

4. Kebutuhan Anggaran yang masih diperlukan:

a) Anggaran pembangunan/rehabilitasi bagi satuan kerja yang bangunannya sudah tidak memenuhi standar kelayakan. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan sarana/prasana yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali tahun 2024, terdapat satuan kerja yang memerlukan pembangunan/rehabilitasi yaitu Rutan Kelas IIB Bangli, Rutan Kelas IIB Klungkung dan Rupsi Kelas I Denpasar dengan total anggaran yang dibutuhkan sejumlah Rp. 11.429.287.000,-

b) Dukungan Anggaran yang berkelanjutan untuk pembangunan Lapas Perempuan Kerobokan yang berlokasi di Desa Antap, Kabupaten Tabanan yang lahannya merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Bali.

c) Anggaran rehabilitasi dan renovasi Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam rangka optimalisasi pelayanan di Kantor Wilayah dan mengakomodir penambahan jumlah pegawai sejumlah Rp. 46.906.089.000,-

5. Pagu Anggaran Tahun 2024

Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 sejumlah Rp. 298.481.823.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai : Rp. 106.509.404.000,-

b) Belanja Barang : Rp. 116.102.483.000,-

c) Belanja Modal : Rp. 75.869.936.000,-

6. Rencana Strategis dan Program Skala Prioritas Tahun 2024

a) Kegiatan bantuan hukum litigasi, bantuan hukum non litigasi dan kegiatan verifikasi dan akreditasi OBH di wilayah

b) Terkait dengan bidang keimigrasian, menjaga stabilitas keamanan nasional, kantor wilayah Hukum dan HAM Bali beserta jajaran melaksanakan program prioritas antara lain: kegiatan operasi di bidang keamanan dan kegiatan pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat.

7. Target PNBPN Tahun 2024

Target PNBPN Tahun 2024 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sejumlah Rp. 1.808.888.343.000,-.

b. Bidang Pengawasan

1. Strategi Mengurangi Overcrowding pada Lapas/Rutan

- a) Optimalisasi program asimilasi dan integrasi di luar Lapas bagi Narapidana yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substantif
- b) Telah dilaksanakan penundaan penerimaan tahanan dari pihak kepolisian dan kejaksaan dan dititipkan sementara di Rumah Tahanan Negara di kantor Kepolisian.
- c) Peningkatan kapasitas gedung baru pada Unit Pelaksana Teknis Lapas dan Rutan guna menambah daya tampung isi hunian untuk tahanan dan narapidana
- d) Melaksanakan redistribusi dan mutasi antar Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

2. Upaya Pencegahan Penyelundupan Barang ilegal

- a) Sinergitas antar instansi penegak hukum dan instansi terkait yang lain;
- b) Peningkatan integritas dan kompetensi serta budaya pelayanan pegawai;
- c) Meningkatkan pengawasan pada area – area rawan/ berpotensi terjadinya penyelundupan barang terlarangan dengan cara menambah CCTV, renovasi tempat yg berpotensi/rawan serta melaksanakan pengawasan secara berjenjang dari pimpinan kepada bawahan;
- d) Meningkatkan jadwal control keliling pada area – area yang berpotensi masuknya barang ilegal;
- e) Meningkatkan pelaksanaan standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan dengan melaksanakan kegiatan Deteksi Dini, Mitigasi Bencana serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip dasar masyarakat (Back to Basic masyarakat);
- f) Melaksanakan Public Campaign secara berkala;
- g) Memberikan sanksi tegas kepada Petugas dan WBP yang melakukan penyelundupan barang ilegal ke dalam Lapas/Rutan.

3. Strategi Peningkatan Kecepatan dan Kualitas Layanan Paspor

- a) Penerapan pelaksanaan pelayanan paspor melalui aplikasi M-Paspor M-Paspor adalah bentuk baru dari Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) yang diterapkan agar pelayanan paspor lebih transparan, akuntabel dan cepat.
- b) Pelayanan Easy Passport adalah pelayanan permohonan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling dan/atau mobile unit Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)
- c) Pelayanan Paspor bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yaitu unit layanan paspor yang khusus melayani permohonan penggantian paspor dengan pembatasan kuota yang telah ditentukan
- d) Pelaksanaan layanan Paspor jemput bola melalui Layanan Mobile Unit SPRI dengan mendatangi Pemohon Paspor yang sakit serta mengirimkan kembali Paspor yang telah selesai kepada pemohon.

IV. Penjelasan Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar

a. Bidang Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

a) DIPA 01

Dari total realisasi Pagu Anggaran DIPA 01 Layanan Dukungan Manajemen Internal, berdasarkan statistik maka didapatkan presentase tingkat penyerapan Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai berikut:

- Belanja Pegawai 72%
- Belanja Barang 72%
- Belanja Modal 43%

b) DIPA 03

Presentase tingkat penyerapan anggaran DIPA 03 (DITJEN BADILUM) sebesar 67%

2. Pagu Anggaran Tahun 2024

Total Pagu Definitif Tahun Anggaran 2024 pada wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar untuk DIPA 01 (BUA) sebesar Rp. 84.523.748.000,- sedangkan untuk DIPA 03 (DITJEN BADILUM) sebesar Rp. 1.801.931.000,-

3. Program Prioritas

a) E-PTSP Terintegrasi merupakan salah satu inovasi dalam mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik di seluruh Pengadilan Umum Wilayah Bali sehingga kedepannya pengguna layanan mendapat kemudahan mengakses tanpa perlu hadir secara langsung.

b) Live streaming putusan merupakan inovasi bentuk komitmen untuk melaksanakan transparansi proses persidangan dan memberikan informasi kepada publik secara cepat dan akurat.

4. Kendala, Permasalahan dan Kebutuhan Dukungan Anggaran

a) Kebutuhan dukungan anggaran pada gedung Pengadilan

b) Usulan kenaikan kelas Pengadilan

c) Kendaraan dinas layak pakai untuk pimpinan Pengadilan

d) Rumah dinas Pengadilan

e) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

f) Prasarana pada Pengadilan

g) Penetapan target perkara oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

b. Bidang Pengawasan

1. Penyelesaian Perkara

a) Pidana

Sebanyak 1.369 Perkara Pidana yang telah diputus oleh PN di wilayah hukum PT Denpasar terdapat:

- 1.268 perkara pidana tidak mengajukan upaya hukum banding
- 101 perkara mengajukan upaya hukum banding

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya 7,4% yang mengajukan upaya hukum manding, 92,6% perkara tidak mengajukan banding dan merasa puas atas putusannya.

2. Perdata

Sebanyak 4.380 perkara perdata yang telah diputus oleh PN di wilayah hukum PT Denpasar terdapat:

- a) 4.166 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding
- b) 214 perkara mengajukan upaya hukum banding

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya 4,9% yang mengajukan upaya hukum manding, 95,1% perkara tidak mengajukan banding dan merasa puas atas putusannya.

3. Kendala Pelaksanaan Eksekusi

- a) Terdapat perkara-perkara lain yang terkait dengan objek eksekusi
- b) Terdapat gugatan atau perlawanan dari pihak berperkara dan/atau pihak ketiga
- c) Pihak yang nyata-nyata menguasai objek eksekusi tidak digugat sebagai pihak
- d) Objek eksekusi sudah berubah
- e) Objek lelang tidak ada peminat
- f) Dukungan dari pihak pengamanan kurang maksimal
- g) Koordinasi pengukuran konstatering dari Badan Pertanahan Kota/Kabupaten tidak selalu berjalan dengan lancar

V. Penjelasan Kepala Pengadilan Tinggi Agama Denpasar

a. Bidang Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

- a) Pagu Anggaran Tahun 2023 PTA Bali dan PA Se- Bali untuk DIPA 01 sebesar Rp. 46.602.103.000. Realisasi sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp. 31.108.407.188,- atau 66,75% . Hal ini disebabkan adanya kelebihan anggaran belanja pegawai. Sekarang sedang dalam proses revisi di MA.
- b) Pagu Anggaran DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Agama se-Bali adalah sebesar Rp. 447.240.000,- dengan realisasi sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp. 366.075.000,- atau 81,85 %.

2. Rencana dan Sasaran Strategis

- a) Memberikan informasi secara transparan melalui kanal-kanal informasi diantaranya website, Instagram, facebook, youtube.
- b) Meningkatkan integritas aparatur PTA dan PA se-wilayah PTA Bali melalui pembinaan baik secara luring / daring.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara terus-menerus agar masyarakat merasa nyaman menerima layanan dan produk dari PTA dan PA se Wilayah PTA Bali.
- d) Selalu berinovasi dalam Teknologi Informasi (TI) untuk mempermudah akses layanan pengadilan.

- e) Terus berusaha memenuhi sarana prasarana di seluruh satker dalam upaya mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan

3. Kendala, Permasalahan dan Kebutuhan Dukungan

- a) Sebagai satker baru PTA Bali memerlukan dukungan anggaran untuk terwujudnya pembangunan gedung kantor PTA Bali yang representatif, termasuk satker yang masih belum prototipe.
- b) Selain itu juga dukungan sarana kendaraan operasional yang cukup untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah.
- c) Karena banyaknya jabatan yang belum terisi baik teknis maupun non teknis, maka perlu juga dukungan tambahan SDM terutama hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan.

b. Bidang Pengawasan

1. Perkara Tahun 2023

Data per tgl 10 Oktober 2023, jumlah perkara di Wilayah Hukum PTA Bali:

- a) Sisa tahun lalu : 35 perkara
- b) Diterima Th 2023 : 1.490 perkara
- c) Diputus : 1.375 perkara
- d) Sisa : 150 perkara

Ada 5 perkara yang mengajukan eksekusi, namun pelaksanaan eksekusi di wilayah PTA Bali berjalan lancar, tidak ada kendala.

2. Perkara yang Menonjol

Keadaan perkara spesifik dan menarik perhatian masyarakat adalah perkara Warga Negara Asing (WNA) yang banyak diterima/ditangani oleh Pengadilan Agama Badung. Ada sebanyak 55 orang yang berperkara di PA. Badung yang terdiri dari 17 negara yaitu: Australia, Inggris, Perancis, Jepang, Belanda, Austria, Rusia, Ceko, Selandia Baru, Jerman, Amerika, Canada, Singapura, Pakistan, Turki, Korea Selatan dan Findlandia.

VI. Penjelasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

a. Bidang Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran dari bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 DIPA 1 adalah sebesar Rp. 5.972.468.659,- (91,19%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 577.043.341,- (8,81%).

2. Rencana dan Sasaran Strategis

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

3. Sarana Prasarana yang dibutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

- a) Tidak ada Rumah Dinas untuk pimpinan type B
- b) Kondisi gedung kesekretariatan PTUN Denpasar perlu merenovasi atap

- c) Biaya renovasi satu rumah dinas PTUN Denpasar di Jl. Saru Gading Gang Gading Mas Denpasar
- d) Perawatan kendaraan 7 unit motor dan 2 unit mobil.

b. Bidang Pengawasan

1. Data Perkara Tahun 2023

- a) Perkara masuk : 25 perkara
- b) Sedang Berjalan : 14 perkara
- c) Perkara yang menonjol dalam pemeriksaan : 0 perkara
- d) Data perkara yang telah selesai : 6 perkara

2. Upaya Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Hakim

- a) Mengikuti setiap kegiatan pendidikan dan Latihan serta bimbingan teknis baik yang diadakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MARI, Dirjen Badilmiltun MARI, maupun Komisi Yudisial.
- b) Melakukan diskusi ilmiah baik dalam bentuk coffee morning, FGD, bincang-bincang ilmiah dan lain-lain, yang dilakukan antara sesama Hakim maupun antara para Hakim dengan para Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti
- c) Melakukan control secara berkala ataupun pengawasan melekat kepada seluruh Aparatur Peradilan sehingga dapat bekerja dengan optimal, bertanggung jawab serta memiliki integritas yang tinggi.

3. Koordinasi yang dilakukan dengan Komisi Yudisial

- a) Penerapan Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/PKY/IV/2009
- b) Koordinasi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Denpasar dengan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali
- c) Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terkait penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diikuti oleh beberapa orang Hakim PTUN Denpasar

I. Penjelasan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

a. Bidang Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu Anggaran tahun 2023 untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) per September 2023 adalah sebesar Rp. 4.665.786.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.253.062.180,- atau 69,72% dan DIPA Ditjen Badilmiltun MA RI (05) sebesar Rp. 78.165.000,- dengan realisasi Rp. 74.727.200,- atau 95,60%.

2. Rencana Strategis dan Program Skala Prioritas

- a) Peningkatan manajemen Peradilan Militer
- b) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA RI
- c) Peningkatan Sarpras aparatur MA RI

b. Bidang Pengawasan

1. Keadaan Perkara

- a) Sisa perkara pidana tahun 2022 yaitu sebanyak 3 perkara

- Perkara masuk dari Januari s/d Oktober 2023 yaitu:
 - Perkara pidana sebanyak 26 perkara
 - Perkara pelanggaran sebanyak 8 perkara
 - b) Perkara terbanyak: Desersi
 - c) Perkara putus dari Januari s/d Oktober 2023 yaitu:
 - Perkara pidana putus sebanyak 23 perkara
 - Perkara pelanggaran lalin putus sebanyak 8 perkara
 - d) Sisa perkara yang masih berjalan yaitu:
 - Perkara pidana sebanyak 6 perkara
 - Perkara Pelanggaran lalin 0 perkara
 - e) Putusan yang telah Berkekuatan Hukum tetap telah dieksekusi oleh pihak terkait.
2. Upaya Peningkatan Kualitas
- a) Mengikutsertakan Hakim dan Personel ke dalam Bimtek yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuan
 - b) Pembinaan personal dan budaya kerja Implementasi PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung kepada seluruh anggota dengan instrumen:
 - Monev Kinerja
 - Pengawasan
 - c) Pengawasan Melekat ke Masmil Surabaya sebagai Masmil dalam wilayah hukum Dilmil III-14

II. Penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023
Realisasi Anggaran BNN Provinsi Bali dan BNN Jajaran sampai dengan september 2023 sebesar Rp. 16.902.437.740,- atau 75,94% dari jumlah pagu Rp. 22.258.701.000,-.
2. Kebutuhan Dukungan
 - a) Pelaksanaan operasi bersinar melalui deteksi dini (test urine) di kawasan rawan narkoba di wilayah Bali sebanyak 18 lokasi dengan sasaran 9.000 orang dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 710.000.000,-
 - b) Tambahan penyelidikan dan penyidikan sebanyak 5 berkas perkara dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 300.000.000,-
 - c) Dukungan tambahan anggaran pembentukan Desa Bersinar (bersih narkoba) sebanyak 2 Desa serta talkshow anti narkoba dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,-
 - d) Peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi BNN Provinsi Bali membutuhkan dukungan anggaran pelatihan untuk 50 orang dan sertifikasi sebanyak 30 petugas rehabilitasi sebesar Rp. 345.648.000,-
3. Pagu Anggaran Tahun 2024
Pagu anggaran BNN Provinsi Bali dan BNNK Jajaran tahun 2024 total sebesar Rp. 20.715.420.000,-

4. Target PNBPN Tahun 2024

Tahun 2024 BNN Provinsi Bali menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 580.000.000,- dengan jumlah layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba sebanyak 2.000 orang.

5. Program Prioritas Nasional

- a) Soft power dengan melakukan pendekatan ke masyarakat khususnya generasi muda melalui kegiatan olahraga, seni budaya dan musik serta pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan desa bersinar.
- b) Hard power approach yaitu strategi Menekan supply narkoba ke Bali dengan fokus melakukan penegakan hukum terhadap jaringan pengedar dan bandar narkoba serta mendukung penuh kegiatan TPPU.
- c) Smart power approach melalui Pemanfaatan teknologi informasi melalui intelijen berbasis teknologi serta media social branding dengan konten P4GN yang edukatif dan menarik.
- d) Cooperation dengan bekerjasama dgn instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Polda, Kumham, Bea Cukai, Majelis Desa Adat serta peningkatan peran serta masyarakat dalam P4GN.

b. Bidang Pengawasan

1. Efektivitas Program Pencegahan dan Pemberantasan

Berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan narkoba di wilayah Bali dari jumlah keseluruhan sebanyak 716 Desa, terdapat:

- a) 72 Desa Kategori Waspada atau 10%;
- b) 173 Desa atau 24% kategori siaga;
- c) 471 Desa atau 65% kategori aman.

BNN Provinsi Bali secara bertahap melakukan intervensi terhadap desa-desa yang berkategori waspada dan siaga agar menjadi kawasan atau desa yang aman dan bersih dari narkoba. Saat ini BNNP Bali telah mengembangkan sebuah sistem yang berisi informasi sebaran kasus yang mencakup desa yang menjadi TKP, jenis barang bukti dan data pelaku yang terdiri dari umur, pendidikan, pekerjaan dan asal pelaku.

2. Pemetaan Jalur Peredaran

- a) BNN Provinsi Bali membentuk Tim Interdiksi Terpadu yang terdiri dari Polri, Bea Cukai, AVSEC Bandara dan Petugas Pelabuhan. Tahun 2023 BNNP Bali berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkoba sabu jaringan Malaysia-Bali yang melibatkan WNA dengan modus insert pada tanggal 14 September 2023 dengan barang bukti sabu sebanyak 172,18 gram neto.
- b) BNN Provinsi Bali melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa titipan untuk mengawasi barang kiriman atau paket yang masuk ke Bali dengan hasil 9 kasus berhasil diungkap dengan modus barang/paket kiriman di tahun 2023
- c) BNN Provinsi Bali melaksanakan operasi rutin di pintu masuk Bali dengan melibatkan Satwa K9 dan mobil X Ray.

3. Sinergisitas dan Kerjasama

BNNP Bali telah melakukan sinergisitas dengan beberapa stakeholder terkait:

- a) Polri dan TNI

- b) Bea Cukai
- c) Lapas
- d) Imigrasi
- e) Dukungan Pemda untuk BNNP Bali dan jajarannya
- f) Cooperation “MoU BNNP Bali dengan stakeholder”, yaitu: Lembaga Pendidikan, Instansi Swasta (maskapai pesawat), Organisasi Masyarakat, dan Instansi Pemerintah.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 ke Provinsi Bali sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di Provinsi Bali, maka terdapat beberapa pokok hal penting atau saran yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan terkait kendala yang dihadapi dan usulan kebutuhan anggaran yang telah disampaikan oleh Para Mitra Kerja Komisi III di Provinsi Bali
2. Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja meminta Kepolisian Daerah Bali dan meminta Kepolisian Daerah Bali untuk semakin meningkatkan upaya Restorative Justice (RJ), meningkatkan SDM Polda Bali dengan program reward dan punishment, memberantas judi online serta memaksimalkan pengamanan Pemilu Tahun 2024 mendatang.
3. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Bali atas penerapan Restorative Justice (RJ), serta meminta Kejaksaan Tinggi Bali untuk mengimplementasikan paradigma KUHP yang baru.
4. Komisi III DPR RI mendukung Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam upaya mengatasi permasalahan overkapasitas Lapas/Rutan dan permasalahan TPPO serta meminta Kanwil untuk menangani permasalahan terkait Warga Negara Asing yang menetap di Indonesia untuk bekerja secara ilegal dan mengancam UKM masyarakat.
5. Komisi III DPR RI mengapresiasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Narkotika yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait lainnya, serta mendukung BNN untuk membuat suatu kajian berupa studi komparasi terkait program yang efektif memberantas narkoba.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bali untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,
Ttd.**

**Dr. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.
A-313**

===HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN===